

**ANALISIS TINGKAT AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN
PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus pada Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono)**

Yuliana Nurkhayati, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Telp/e-mail: 085700473482 / yuliananurkhayati27@gmail.com
Ilham Maulana Saud, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Telp/e-mail: 082221774256 / ilhammaulanasaud@gmail.com

ABSTRACT

Accountability is important for nonprofit organizations. As a nonprofit organization, an orphanage should be responsible for its organizational activities to the community especially the donors. Therefore, this study aims to analyze the level of accountability in the management of Muhammadiyah Tuksono orphanage. This is done to make the donors feel satisfied and believe in the allocation of funds and the accountability of funds managed by the orphanage. This is a descriptive research using qualitative approach. The data were obtained by conducting interview, observation, documentation, and distributing questionnaire. The obtained data were then analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings of the research show that Muhammadiyah Tuksono orphanage has done vertical accountability. However, horizontal accountability was inadequate because the service procedure for donors has not been available yet, the documentation of program planning and monitoring has not been systematic, there has been repeated position in every period, and the financial report has not been in line with PSAK No.45.

Keywords: Accountability, Islam, Orphanage.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan hal penting dalam organisasi sektor publik. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 1 poin 1 dan 3 dalam peraturan tersebut tertulis bahwa wajib bagi instansi pemerintah untuk mengeluarkan laporan keuangan serta laporan hasil kinerja periodik. Ini merefleksikan bahwa organisasi sektor publik dituntut untuk akuntabel dalam setiap aktivitas organisasinya.

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa :

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Substansial dari akuntabilitas adalah adanya sebuah keharusan bagi manajemen (*agent*) untuk melaporkan kegiatan rutin, kebijakan, proyek, dan program yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah (aset) yang dititipkan kepadanya, serta adanya hak bagi pemilik modal untuk meminta pertanggungjawaban sebagai konsekuensi logis. Namun dalam praktiknya, seringkali terdapat organisasi sektor publik yang tidak mencerminkan nilai akuntabilitas. Penelitian Wicaksono (2015), ditemukan hasil penelitian bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik masih belum optimal. Ini disebabkan karena organisasi sektor publik belum mampu memberikan penjelasan penggunaan sumber daya publik dalam menjalankan kebijakan, program, dan proyek. Temuan terbaru di tahun 2017, KPK menemukan kepatuhan pelaporan harta anggota legislatif sebesar 28 % (News Idntimes, 2017). Ini menunjukkan masih rendahnya tingkat akuntabilitas dipemerintahan.

Ditemukan pula penelitian pada bidang organisasi sektor publik non pemerintah akuntabilitas yang belum optimal. Pada penelitian Gultom (2015), hasil penelitian adalah laporan keuangan pada gereja belum sesuai dengan PSAK No. 45. Ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia untuk membuat laporan keuangan. Penelitian Yuniarti (2014) juga ditemukan laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember tidak lengkap dan belum sesuai dengan PSAK No. 45. Dilansir dari laman *website* Portal Kalimantan Utara bahwa beberapa laporan dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada yayasan di Kalimantan Utara belum mencapai target (Prokal, 2017).

Penelitian Sudaryanti (2011) menjabarkan kelemahan-kelemahan pada akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional hanya meliputi materi, manusia, alam semesta dan kehidupan. Akuntabilitas konvensional menyandarkan pada kemampuan manusia untuk menyelesaikan *problem* pelimpahan wewenang. Pertanggungjawaban melibatkan dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Pertanggungjawaban hanya secara vertikal terhadap manusia. Padahal sejatinya manusia memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi (Siskawati, 2016). Permasalahan akan timbul karena ada kepentingan pribadi. Pengetahuan antara pemilik modal dan manajemen yang terbatas menyebabkan asimetri informasi. Inilah kelemahan akuntansi konvensional, untuk mengatasinya maka perlu sesuatu yang menyatukan kepentingan yang berbeda dengan cara yang mendasar.

Islam sebagai mabda dan agama memiliki solusi disetiap permasalahan yang muncul di bumi. Dalam Islam pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada manusia, alam semesta dan kehidupan. Pertanggungjawaban dalam Islam juga bersifat vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akuntabilitas pada Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono?
2. Apa kendala-kendala yang dialami Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono?
3. Apa solusi yang dapat diberikan terhadap kendala-kendala yang dialami?

II. METODE PENELITIAN

A. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskripsi, didukung dengan studi pustaka dengan pendalaman pengkajian berupa data, sehingga realita dapat dipahami manusia dengan baik serta perbandingan antara teori, konsep, dan standar dengan praktik yang berjalan di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini mengungkapkan praktik Akuntabilitas dalam Perspektif Islam di Panti Asuhan. Obyek penelitian ini adalah Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono yang beralamat di Karang, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55664. Alasan dipilihnya Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono adalah *pertama* Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono meraih akreditasi A (Sangat Baik) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2016, *kedua* Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono merupakan salah satu amal usaha muhammadiyah, *ketiga* sebagai sebuah lembaga nirlaba yang harus sesuai syariat Islam.

B. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Data primer berupa data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, kuisioner dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung berupa bukti, catatan dan laporan yang diarsipkan. Data sekunder yang dibutuhkan peneliti adalah Al Qur'an dan Al Hadist, Laporan Keuangan, PSAK No. 45 tentang Organisasi Nirlaba, dan data kegiatan Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek, dimana peneliti telah menetapkan kualitas dan karakteristik yang akan dipelajari peneliti kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Populasi keseluruhan unit analisis dalam penelitian ini adalah panti asuhan. Panti asuhan yang menjadi populasi penelitian adalah Panti asuhan yang berlandaskan Islam, terakreditasi sangat baik dari Kementerian Sosial, dan terdaftar di Dinas

Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga penelitian dilakukan di Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan pada penelitian ini adalah menggunakan konsep triangulasi. Data yang sudah dikumpulkan diperkuat dengan pendapat dari pakar. Teknik pertama dengan observasi dimana peneliti mengamati obyek penelitian. Observasi partisipatif dipilih oleh peneliti, dimana observasi partisipatif moderat yang dipilih oleh peneliti. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.

Teknik kedua adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan berupa tulisan. Teknik ketiga adalah kuisisioner. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan seperangkat pertanyaan kepada narasumber secara tertulis. Kuisisioner dilakukan dengan metode survey diambil. Survei diambil adalah survey dengan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dan hasilnya akan diambil secara pribadi oleh peneliti.

Teknik keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan pelengkap teknik pengumpulan data observasi, kuisisioner dan wawancara. Dokumentasi yang diperlukan oleh peneliti adalah profil organisasi, kebijakan peraturan organisasi, supremasi hukum, laporan keuangan dan lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dari analisis sebelum di lapangan. Peneliti melakukan pencarian data panti asuhan melalui buku dan laman internet. Kemudian data yang diperoleh diolah untuk menentukan fokus penelitian. Proses analisis dilanjutkan selama di lapangan. Pencarian data melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data dikumpulkan. Data yang diperoleh direduksi dengan merangkum hal-hal pokok dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mendisplay data. Mendisplay data berarti menyajikan data. Penyajian data berupa bagan, dan uraian singkat. Kemudian, peneliti meminta pendapat seorang pakar untuk memvalidasi data yang didapatkan peneliti di lapangan. Langkah terakhir adalah *conclusion drawing and verification*. Penarikan kesimpulan dilakukan ketika *step-step* analisis data sebelumnya sudah dilakukan secara tertib. Kesimpulan awal adalah kesimpulan sementara, dapat menjadi kesimpulan kredibel apabila kesimpulan yang diputuskan saat diverifikasi sesuai dengan bukti-bukti di lapangan.

III. HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Profil Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono

1. Latar Belakang Panti Asuhan

Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono beralamat di Dusun Karang, Kelurahan Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono berdiri pada 18 Juli 2005. Berdirinya panti asuhan adalah adanya keinginan kuat dari salah satu kader Muhammadiyah yaitu Bapak Pardi untuk mengasuh anak. Keinginan ini disampaikan kepada keluarga dan dimusyawarahkan oleh kader-kader Muhammadiyah Dusun Karang. Latar belakang berdirinya panti asuhan adalah pengamalan dari Surat Al Ma'un ayat 1-7. Allah SWT berfirman yang artinya :

“Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan Agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan mengulurkan pertolongan/bantuan secara berhasil guna dan berdaya guna” (QS. Al Ma'un ayat 1-7)”.

KH. Ahmad Dahlan menerjemahkan ayat tersebut kedalam kehidupan sosial. Beliau menyatakan, surat tersebut mengajarkan bahwa ibadah ritual itu tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Surat ini bahkan menyebut mereka yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai 'pendusta agama'. Maka atas spirit inilah Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono berdiri.

Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono memiliki 2 gedung utama yaitu gedung panti putra dan gedung panti putri. Kedua gedung dipisahkan oleh jalan raya. Masing-masing gedung memiliki fasilitasnya masing-masing. Gedung panti putra memiliki fasilitas berupa aula yang sering digunakan untuk acara dan belajar anak santri, kamar untuk tempat tidur, dapur untuk memasak, kamar mandi, ruang khusus belajar, perpustakaan, rumah pengasuh dan ruang konseling. Fasilitas pada gedung panti putri adalah kamar tidur, mushola, kamar mandi, dapur, rumah pengasuh dan ruang belajar.

Jumlah anak keseluruhan adalah 40 anak. Putra 20 anak dan putri 20 anak. Tingkat pendidikan terdiri dari TK, SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Tidak semua anak panti yatim piatu, latar belakang keluarga ada yang tidak mampu dari segi ekonomi sehingga anak mereka dititipkan.

2. Kegiatan Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono

a) Shalat Berjamaah

Santri putra dan santri putri Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono diharuskan untuk melaksanakan shalat berjamaah. Shalat subuh, shalat ashar, shalat maghrib dan shalat isya' santri putra diwajibkan shalat di Masjid Nurul Ummah dekat panti asuhan. Shalat dhuhur mereka laksanakan di sekolah. Santri yang sudah besar diharuskan untuk melaksanakan shalat malam. Rutinitas shalat malam dilakukan agar santri terdidik menjadi generasi yang shalih. Walaupun dalam pelaksanaannya belum semua santri yang menjalankan.

b) Madrasa Diniyyah

Untuk meningkatkan pengetahuan ilmu agama santri, Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono menyelenggarakan Madrasah Diniyyah. Madrasah Diniyyah setiap hari dilaksanakan dengan pelajaran yang sudah terjadwal. Kajian dilakukan pada waktu ba'da subuh, ba'da ashar, dan ba'da maghrib. Kajian santri putra dan santri putri dipisah. Masing-masing melaksanakan kajian di tempat masing-masing. Selain itu, kajian juga dibagi antara santri tingkat SD dan santri tingkat SMP/SMA. Kajian diisi oleh ustadz dari dalam dan dari luar panti asuhan. Santri yang sudah mampu pun juga mengisi kajian. Pelajaran yang diajarkan dalam kajian yaitu bahasa arab, aqidah, akhlaq, hadist, tahfidh, tafsir Al-Qur'an, Ibadah, kemuhammadiyah, tarikh, pidato bahasa jawa, tajwid, doa-doa, motivasi dan evaluasi.

c) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)

Setiap hari Senin dan hari Kamis sore diadakan TPA di Masjid Nurul Ummah. Santri panti asuhan yang mampu membaca Al Qur'an dengan baik, diharuskan menjadi pengajar di TPA baik putra maupun putri. Bagi santri yang belum bisa membaca menjadi peserta TPA bersama masyarakat sekitar. Kegiatan TPA tidak hanya membaca Al Qur'an namun juga menghafal surat dan menghafal doa-doa. Peserta diberi buku yang berisi daftar surat dan doa-doa yang akan dihafal.

TPA yang dilaksanakan pada hari senin dan kamis bertepatan dengan hari puasa sunnah, maka setelah kegiatan mengaji dilanjutkan buka bersama. Sebelum buka bersama biasanya ada kultum yang diisi oleh santri putra panti asuhan. Buka puasa bersama ini rutin dilaksanakan tidak hanya untuk peserta TPA namun juga bersama masyarakat sekitar dan dilanjutkan shalat maghrib berjamaah.

d) Rihlah

Rihlah atau perjalanan adalah kegiatan rutin panti yang dilaksanakan setiap selesai semester sekolah pada hari libur. Kegiatan ini bertujuan untuk mentadaburi alam dengan niat karena Allah SWT. Perjalanan ini sebagai liburan santri dari aktivitas belajar yang berlangsung lama. Perjalanan ini juga untuk mengembalikan semangat santri untuk kembali belajar pada semester depan. Tempat-tempat yang dikunjungi adalah

tempat wisata alam sekitar Kulon Progo. Harapan pengurus dengan adanya rihlah ini mampu menguatkan ukhuwah keluarga panti asuhan serta membangun rasa kebersamaan dan kepedulian.

e) **Penyembelihan Hewan Kurban Idhul Adha.**

Idhul Adha merupakan momentum tahunan perekatan kebersamaan antara panti asuhan dan masyarakat. Panti asuhan menyembelih hewan kurban bersama masyarakat. Hewan kurban yang disembelih adalah sapi. Hewan berasal dari donatur atau terkadang berasal dari panti asuhan sendiri. Panti asuhan bersama masyarakat menyembelih hewan kurban di depan Masjid Nurul Ummah

f) **Ramadan**

Santri putra dan putri Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono diamanahi oleh masyarakat untuk mengelola Masjid Nurul Ummah. Santri bersama remaja Dusun Karang tergabung kedalam Takmir Masjid Nurul Ummah. Takmir masjid inilah yang mengatur kegiatan selama bulan Ramadan.

Santri panti asuhan dibagi 2 tim saat bulan ramadhan. Ada yang ikut kegiatan di Masjid Nurul Ummah ada juga yang menyebar ke masjid-masjid daerah Sentolo. Santri putra maupun putri tim 1 yang bertugas di Masjid Nurul Ummah mengajar TPA. TPA pada bulan ramadhan dilaksanakan setiap hari. Selain TPA, pada bulan ramadhan ada kajian sore. Pengisinya ada ustad dari panti maupun masyarakat dan juga santri putra. Materi pengajian seputar ramadhan, agar meningkatkan ketakwaan masyarakat pada Allah dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa.

Untuk tim 2 bertugas di masjid-masjid sekitar sentolo. Santri putri mengajar TPA anak-anak dan lansia. Sedangkan santri putra mengisi kajian sore. Selain TPA dan kajian sore, juga ada acara tarawih keliling. Tarawih keliling adalah tarawih yang berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Biasanya diikuti oleh beberapa santri putra dan pengurus panti. Tarawih keliling dilakukan untuk mempererat silah ukhuwah antar masyarakat Sentolo.

3. Sumber Keuangan Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono

a) **Pemerintah**

Panti Asuhan menjadi lembaga yang termasuk naungan Kementrian Sosial. Dalam pendanaanya, panti asuhan mendapat dana dari pemerintah. Uang ini digunakan untuk kebutuhan pokok anak. Demikian halnya Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono yang juga mendapat dana dari pemerintah. Anak-anak yang mendapatkan bantuan adalah anak tingkat SMP-SMA. Dana yang diberikan Kementrian Sosial dikirim melalui rekening. Rekening atas nama anak pribadi namun dengan wali yaitu pengurus harian panti Bapak Jarsono.

Uang digunakan untuk keperluan sekolah anak. Panti asuhan juga mengajukan dana ke pemerintah daerah. Pada tahun 2015 mendapatkan

bantuan dana dari pemerintah dan gubernur. Dana yang didapatkan diambil panti asuhan 10 %, lalu 90% untuk anak panti asuhan serta untuk anak kurang mampu di Dusun Karang. Pemberian dana dari pemerintah sering hanya untuk anak. Panti asuhan hanya mendapat 10% dari dana yang didapatkan. Dana 10% itulah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas panti asuhan. Minimnya dana membuat pembangunan belum maksimal.

b) Lembaga swasta

Donatur dalam panti asuhan terbagi kedalam dua jenis yaitu donatur tetap dan donatur tidak tetap. Lembaga swasta yang menjadi donatur tidak tetap di Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono ada badan zakat, perusahaan dan universitas. Donatur tersebut memberikan dana tidak setiap waktu. Seperti badan zakat menyumbang di Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono pada tahun 2017. Tahun 2018 belum menyumbang lagi. Sumbangan donatur tidak tetap berupa uang dan sembako. Biasanya sumbangan diantar ke panti asuhan.

Donatur tetap adalah donatur yang memberikan dana setiap waktu dalam jangka panjang. Lembaga swasta yang menjadi donatur tetap di Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono adalah Yayasan Dharmais. Yayasan Dharmais memberikan bantuan berupa uang. Bantuan dikirim Yayasan Dharmais setiap 3 bulan sekali melalui transfer rekening.

c) Masyarakat

Sumber dana Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono juga dari masyarakat. Masyarakat ada yang menjadi donatur tetap dan donatur tidak tetap. Masyarakat yang menjadi donatur adalah masyarakat pada umumnya dan kader Muhammadiyah pada khususnya. Pengurus Ranting Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Muhammadiyah tidak secara khusus memberikan dana kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono. Namun, kader-kader muhammadiyah secara aktif menjadi donatur tetap di panti asuhan.

Masyarakat biasanya menyumbang berupa uang. Uang diberikan masyarakat kepada panti setiap sebulan sekali. Ada petugas khusus yang mengambil uang dari para donatur di sekitar Kecamatan Sentolo. Selain mengambil uang, petugas juga memberikan bukti laporan keuangan kepada donatur sebagai bentuk pertanggungjawaban panti terhadap masyarakat.

d) Swadaya Panti Asuhan melalui Usaha Ekonomi Produktif

Sumber dana Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono juga berasal dari Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Panti asuhan memiliki usaha berupa toko kelontong, gas LPG 3 kg dan pengisian ulang air minum RO. Ketiga usaha tersebut dilakukan untuk menambah pemasukan dana panti asuhan. Beberapa sumber dana di atas dicatat dalam buku kemudian dilaporkan tiap bulannya di rapat rutin malam Kamis.

B. Akuntabilitas dalam Islam

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban manusia kepada pencipta-Nya. Akuntabilitas vertikal dalam panti asuhan diterjemahkan bahwa manusia memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari dua pijakan utama, konsep tauhid dan konsep kepemilikan (Maali dan Napier dalam Basri, 2008).

a) Konsep Tauhid

Nilai tauhid pada pengelolaan panti asuhan ditemukan dalam beberapa hal:

1. Kesadaran pengurus panti asuhan baik ketua, bendahara, dan pengurus harian bahwa tugas mereka merupakan titipan (amanah) dari Allah SWT. Mereka tidak mendapat gaji dari jasa mereka mengurus panti asuhan. Ini dapat kita lihat pada penggalan wawancara kepada Bapak Juwari selaku ketua panti asuhan :

Apa alasan bapak/ibu menerima amanah sebagai pengurus panti asuhan?

“Inilah jalan kami dalam mengabdikan, kami tidak punya apa-apa karena pemberian Allah harus disyukuri. Kepedulian kami pada orang lain dibuktikan dengan mengurus mendirikan panti walupun minim agama. Pengurus juga tidak ada honor. Namun kalau pas ada kegiatan hari raya kita berikan THR sangat sedikit sekali. Untuk beli baju dan tidak ada gaji dari panti. Mudah mudahan termasuk jihad fiisabilillah.”

Dari penggalan wawancara diatas dapat kita pahami bahwa pengurus panti asuhan sadar bahwa mengurus panti asuhan adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT dan menjadi bentuk ibadah.

2. Selama panti asuhan berdiri tidak ada kecurangan yang terjadi. Aktivitas panti asuhan berjalan dengan sehat dalam bingkai ibadah. Kejujuran menjadi prioritas pada diri pengurus panti asuhan. Allah SWT berfirman :

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.(QS. Az-Zumar)

Kejujuran dapat dilihat pada setiap pelaporan keuangan panti asuhan yang selalu sesuai dengan transaksi ekonomi yang terjadi. Pelaporan keuangan diungkapkan pada rapat bulanan. Rapat bulanan

diadakan setiap hari kamis malam. Rapat bulanan membahas berbagai perkembangan program panti, agenda panti dan pelaporan keuangan. Dalam rapat bulanan aktivitas-aktivitas panti asuhan selama sebulan diungkapkan.

3. Dana panti asuhan digunakan untuk keperluan panti asuhan. Dana panti asuhan digunakan untuk kebutuhan santri juga untuk membangun fasilitas panti. Prioritas panti adalah kebutuhan para santri. Jika kebutuhan santri sudah terpenuhi maka baru panti asuhan menggunakannya untuk membangun fasilitas panti. Bahkan bila ada bantuan dana dari pemerintah, panti hanya mengambil 10% dari jumlah dana untuk membangun panti asuhan dan kebutuhan administratif. Selebihnya dana digunakan untuk kebutuhan panti asuhan berupa kebutuhan sekolah dan makan sehari-hari. Dengan melakukan ini, pengurus panti telah menyadari bahwa Allah adalah *ultimate principal* yang menginginkan panti asuhan untuk menjaga anak yatim.
 4. Program-program panti asuhan merupakan program Islami. Program yang diselenggarakan panti asuhan keseluruhan berbasis Islam. Dari program shalat berjamaah, madrasah diniyyah, TPA, rihlah, penyembelihan hewan kurban dan ramadan. Ini sebagaimana visi panti asuhan yaitu menjadi lembaga kesejahteraan sosial anak mampu mewujudkan pengasuhan terbaik anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak (sosial, pendidikan dan dakwah) melahirkan generasi Islam yang unggul, terampil, mandiri dan berakhlak mulia yang berwawasan muhammadiyah. Dari program-program tersebut secara sadar, santri dituntut untuk selalu dekat dengan Allah. Aktivitas hariannya selalu berhubungan dengan Sang Penciptanya.
- b) Konsep Kepemilikan
- Nilai kepemilikan pada panti asuhan dapat ditemukan pada beberapa hal :
1. Panti asuhan secara sosial dan pendidikan telah memberi manfaat bagi masyarakat. Santri Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono banyak berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Kontribusi santri berupa pengajaran TPA. Setiap hari Senin dan Kamis santri menjadi pengajar di TPA. Memberikan ilmunya kepada anak-anak yang akan belajar mengaji. Kegiatan TPA tidak hanya membuat anak bisa membaca Al Qur'an namun juga mendidik mereka agar menjadi anak muslim yang taat pada Rabbnya. Saat bulan Ramadan tiba, aktivitas mengajar lebih padat. Kecuali hari Sabtu, TPA diadakan setiap sorenya. Para santri selain mengajar TPA juga menjadi penceramah di masjid-masjid sekitar panti asuhan.
 2. Panti asuhan tidak hanya menggunakan dana untuk kebutuhan pribadi namun juga untuk masyarakat. Panti asuhan juga mengasuh anak yang berada diluar panti. Anak-anak yang kurang mampu didata lalu diberi

bantuan pada waktu tertentu. Bantuan yang diberikan panti asuhan berupa uang dan peralatan sekolah. Panti asuhan bila mengadakan acara maka anak luar panti yang tergolong kurang mampu tadi juga diundang. Mereka disatukan dengan anak-anak panti. Seperti bila ada acara amal bakti sosial. Saat bulan Ramadan biasanya banyak organisasi yang mengunjungi panti. Mereka ada yang sekedar bersilaturahmi ada juga yang akan mengadakan acara di panti seperti buka bersama. Pada saat itulah anak luar panti diundang untuk turut bergabung dengan anak panti lainnya. Selain membantu anak yang kurang mampu, pengurus panti asuhan berharap hubungan anak luar dan dalam panti asuhan seperti hubungan saudara yang saling menyayangi.

3. Sumber dana panti asuhan berasal dari sumber dana yang halal. Sumber dana panti asuhan berasal dari pemerintah, swasta, masyarakat dan swadaya UEP (Usaha Ekonomi P). Peneliti tidak menemukan adanya penerimaan atau pendapatan panti asuhan dari sumber yang haram atau *syubhat* semisal perusahaan minuman keras dan rokok.
4. Penggunaan dana panti asuhan digunakan sesuai aturan Allah SWT. Penggunaan dana panti asuhan digunakan sesuai dengan peran atau fungsi panti asuhan. Dana yang diterima digunakan untuk membangun panti asuhan dan kebutuhan sehari-hari.

Keempat hal yang dilakukan panti asuhan adalah perwujudan dari nilai kepemilikan. Pengurus panti asuhan sebagai hamba Allah yang mendapat amanah menyebarkan manfaat bagi masyarakat. Tidak ditemukan pelanggaran larangan Allah terkait pengelolaan panti asuhan.

2. Akuntansi Horizontal

a) Akuntansi Kejujuran dan Hukum

Pasal 3 ayat 1 UUY disebutkan bahwa “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”. Selanjutnya pada pasal 3 ayat 2 berbunyi “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.” Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono memperoleh sumber dana dari pemerintah, lembaga swasta, masyarakat dan swadaya ekonomi. Dana yang diperoleh disalurkan untuk kebutuhan panti asuhan. Tidak ada pembagian dana dari panti asuhan kepada pengurus, Pembina dan pengawas. Dana yang diperoleh panti asuhan murni untuk panti asuhan. Ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UUY yang berbunyi "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara

langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas."

Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono merupakan salahsatu badan usaha muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri sudah mendapat surat izin berdiri dari Kemenkumham No.: Ahu-88.Ah.01.07. Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010. Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono mendapat izin operasional dengan nomor akta notaris No. : 01/Viii-2005 Tanggal 02 Agustus 2005.

Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono juga mendirikan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Usaha Ekonomi Produktif sudah mendapat izin operasional BKPM No. : 222/368/Kp2tsp/2017 Tanggal 24 Januari 2017. Usaha ekonomi yang di dirikan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono adalah usaha penjualan gas elpiji, pengisian ulang air bersih dan toko kelontong.

Berdasarkan teori akuntabilitas kejujuran terkait dengan adanya penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) menjamin adanya peraturan yang terkait dengan supremasi hukum dan peraturan lain dalam organisasi. Sehingga Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono dalam akuntabilitas kejujuran dan hukum memadai.

b) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terdiri dari sistem manajemen informasi dan prosedur administrasi yang di publikasikan. Sistem manajemen informasi sudah dilaksanakan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono yaitu dengan membuat *website* dengan alamat pantimuhtuksono.org. *Website* tersebut berisi profil panti asuhan secara keseluruhan. Mulai dari surat perizinan operasional panti asuhan, visi dan misi panti asuhan, struktur organisasi, daftar anak panti asuhan, *jobdesk* pengurus, sumber dana, rutinitas santri dan pengurus, dan jadwal harian santri. Yang masih kurang adalah panti asuhan belum memasukan laporan keuangan. Data tersebut merupakan aspek penting bagi *stakeholders*. Sehingga data internal harus ditampilkan di *website* untuk mempermudah para pemangku kepentingan mengakses data panti asuhan.

Prosedur administrasi merupakan bagian dari akuntabilitas proses. Prosedur administrasi pada Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono berupa papan prosedur pelayanan yang dipasang di ruang tamu yang mudah dilihat oleh penerima layanan. Prosedur pelayanan di buat dalam bentuk diagram kotak dengan tanda panah ditulis dengan huruf cetak. Prosedur pelayanan berfungsi sebagai media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibuat oleh Panti Asuhan

Muhammadiyah Tuksono berupa pelayanan penerimaan santri. Prosedur tersebut memaparkan penerimaan santri mulai dari registrasi, proses pembinaan dan output dari panti asuhan.

Bila santri memenuhi persyaratan, selanjutnya adalah proses pembinaan santri. Proses pembinaan dibagi kedalam beberapa aspek. Ada aspek fisik dan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan anak. Aspek mental dan keagamaan yang bertujuan meningkatkan kondisi mental dan keagamaan. Aspek pendidikan keterampilan yang bertujuan terlaksananya pemberian pendidikan dan keterampilan bagi anak asuh. Aspek sosial yang bertujuan meningkatkan sikap sosial anak asuh. Aspek-aspek tersebut bertujuan untuk mewujudkan tumbuh kembang anak asuh secara wajar. Setelah pembinaan dilakukan maka terminasi anak dapat bekerja atau dikembalikan ke keluarga.

Berdasarkan teori prosedur administratif keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara No.Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ada hal yang belum dilaksanakan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono yaitu prosedur pelayanan bagi donatur belum ada. Padahal sesuai peraturan harus dibuat prosedur pelayanan bagi donatur, selain sebagai media juga sebagai pengendali dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.

c) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan pengungkapan program-program panti asuhan yang merupakan jabaran dari misi panti asuhan. Akuntabilitas program mencakup perencanaan program, pelaksanaan program monitoring dan evaluasi program.

1) Perencanaan program

Para pengurus panti asuhan sudah mendokumentasikan perencanaan program namun belum sistematis. Program-program masih berupa program induk yang belum dijabarkan kedalam program utama dan kegiatan. Program panti asuhan belum berkaitan dengan kegiatan. Jadi program dan kegiatan terpisah. Bahkan untuk program pembangunan masih dilakukan secara insidental karena kendala dana. Hal ini diutarakan oleh Bapak Juwari selaku ketua Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono :

“Program untuk pembangunan itu insidental mbak. Tidak setiap tahun di bangun. Paling kalau ada dana lebih baru rencana membangun.”

Padahal perencanaan program yang sistematis sangat penting bagi perkembangan organisasi. Dengan membuat perencanaan program maka pengurus sudah yakin dengan aktivitas panti asuhan di masa periodisasi tertentu.

2) Pelaksanaan program

Untuk pelaksanaan program panti asuhan yang sedang dilaksanakan cukup tercapai dengan kesesuaian perencanaan program yang di harapkan. Program yang belum tercapai adalah program pembelajaran. Program pembelajaran dan penunjang *lifeskill* menemui kendala yaitu santri malas dalam belajar.

Berdasarkan teori tentang pelaksanaan program yaitu kesesuaian perencanaan dengan proses pelaksanaan program dengan hasil tercapai secara signifikan yaitu dengan proses pelaksanaan program sudah sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil yang direncanakan. Maka dari itu, ada yang belum terlaksana yaitu kesesuaian perencanaan program dengan pencapaian hasil (*output*) yang direncanakan.

3) Monitoring dan Evaluasi

Pengurus panti asuhan melakukan monitoring program panti asuhan setiap waktu. Pengawasan program panti asuhan disampaikan hasilnya setiap seminggu sekali pada rapat rutin hari Kamis malam. Kendala-kendala program disampaikan langsung oleh ketua panti asuhan dihadapan para pengurus dan beberapa santri. Untuk pembangunan yang sedang dilakukan, monitoring dilakukan oleh ketua sendiri pada kesempatan beberapa waktu. Bila ada kekurangan bahan bangunan maka ketua menanganinya terlebih dahulu.

Berdasarkan teori tentang monitoring dan evaluasi secara berkala yaitu dengan organisasi sudah memiliki mekanisme yang baku yang sudah terintegrasi sejak perencanaan program dan sudah diimplementasikan dalam setiap program organisasi. Sehingga akuntabilitas program dalam aspek mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala sudah dilaksanakan oleh panti asuhan. Hanya saja, untuk pendokumentasian perencanaan program hingga evaluasi program belum disusun secara sistematis. Padahal pendokumentasian sangat perlu dilakukan untuk bukti arsip pertimbangan program di masa datang.

d) Akuntabilitas Kebijakan

1) Pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan di Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono dilakukan secara terbuka pada rapat rutin mingguan. Rapat dihadiri oleh pengurus panti, anggota Muhammadiyah, dan beberapa santri panti asuhan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dan kesepakatan bersama. Musyawarah untuk mufakat adalah tujuan dari pengambilan keputusan.

2) Kepemimpinan

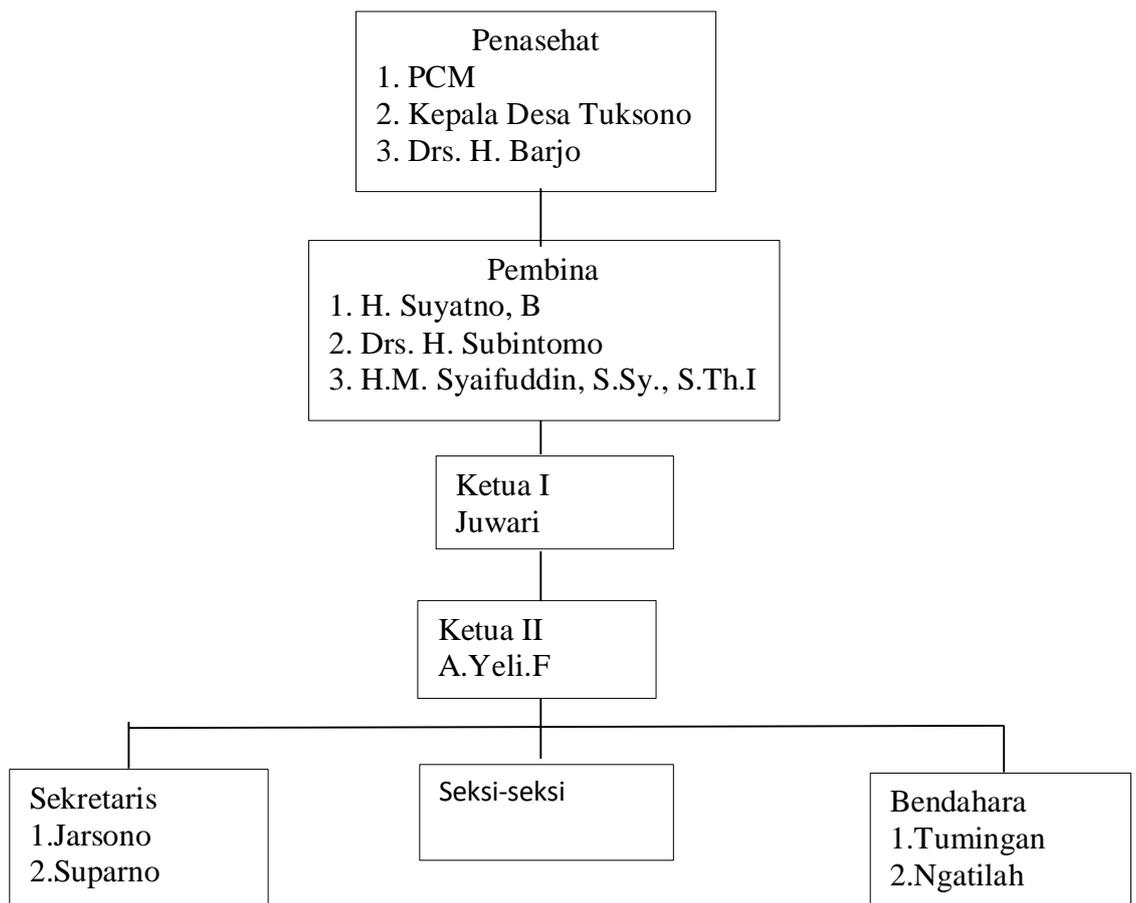
Kepemimpinan dalam panti asuhan memiliki periode 5 tahun. Ini sesuai dengan kesepakatan pengurus panti dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM). Masa jabatan pengurus dapat diangkat kembali tanpa ada batas masa jabatan. Hal ini terekam melalui

pernyataan ketua Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono Bapak Juwari:

“Kepemimpinan panti 5 tahun. Lima tahun sekali diadakan musyawarah memilih pengurus panti. Namun dalam beberapa periode pengurus terpilih kembali dengan susunan yang sama.”

Berdasarkan teori tentang perodesasi jabatan yaitu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Maka akuntabilitas kebijakan pada aspek kepemimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono belum memadai.

3) Struktur Organisasi Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono



Struktur organisasi Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono di atas, bahwa para pengurus panti asuhan sudah memperhatikan pemisahan tugas dimana dewan penasehat tidak merangkap jabatan sebagai anggota pelaksana, dewan Pembina yaitu Bapak Suyatno, Bapak Subintomo, dan Bapak Syaifuddin juga tidak merangkap jabatan sebagai anggota pelaksana.

Berdasarkan teori tentang pemisahan organ-organ yang terdiri dari dewan penasehat, dewan pembina dan dewan pelaksana yaitu dengan organisasi sudah memisahkan antara anggota dewan penasehat dan dewan pembina dengan tidak merangkap sebagai anggota pelaksana. Sehingga akuntabilitas kebijakan dalam struktur organisasi yang dilaksanakan Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono sudah memadai. Namun, papan struktur organisasi yang berada di ruang tamu panti asuhan belum mencantumkan dewan penasehat dan Pembina.

a) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pengungkapan panti asuhan dalam hal keuangan yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono terdiri dari, laporan keuangan harian panti asuhan, laporan keuangan untuk donatur tetap, laporan keuangan untuk lembaga swasta dan laporan keuangan untuk pemerintah.

1) Laporan Keuangan Harian

Laporan keuangan harian Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono ditulis dalam buku tulis. Buku terdiri dari buku uang masuk, buku pengeluaran panti dan buku kas panti. Pencatatan dilakukan terpisah agar memudahkan dalam penghitungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ngatilah selaku bendahara II di Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono:

“Laporan keuangan saya tulis di buku menggunakan pensil mbak agar mudah dihapus kalau salah. Penulisan ada tiga macam, buku uang masuk, pengeluaran panti, dan kas panti biar kalau ada kesalahan gampang ngitung ulangnya. Saya juga belum bisa kalau nulis laporan yang modern. Saya juga dibantu suami saya dalam mengeluarkan laporan keuangan donatur.”

Pos-pos yang tercantum dalam laporan keuangan harian adalah kebutuhan harian panti asuhan. Kebutuhan harian seperti kebutuhan administrasi, kebutuhan pendidikan santri, kebutuhan transportasi, kebutuhan kegiatan. Pencatatan pengeluaran maupun pemasukan dilakukan setiap hari oleh Ibu Ngatilah untuk menghindari kesalahan. Laporan keuangan harian lalu dilaporkan sebulan sekali di rapat rutin di akhir bulan.

2) Laporan Keuangan untuk Donatur Tetap

Laporan keuangan untuk donatur tetap dibuat setiap sebulan sekali. Ibu Ngatilah di bantu suaminya dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan untuk donatur tetap menyajikan nominal uang dari donatur serta pemanfaatannya selama sebulan. Laporan keuangan yang sudah di tandatangani ketua dan bendahara di cetak sesuai jumlah donatur lalu dibagikan kepada donatur. Petugas yang membagikan laporan keuangan adalah yang memang mempunyai waktu luang, tidak hanya satu orang saja. Laporan diberikan sekaligus donatur memberikan sumbangan untuk bulan selanjutnya.

3) Laporan Keuangan untuk Lembaga Swasta

Laporan keuangan untuk lembaga swasta adalah laporan keuangan yang disusun atas donatur lembaga swasta. Di Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono, lembaga swasta sebagai donatur tetap adalah Yayasan Dharmais. Yayasan Dharmais meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali. Laporan keuangan disusun harus sesuai keinginan yayasan tersebut. Laporan keuangan itu terdiri dari Laporan Posisi Kas Keuangan, Penerimaan Uang Bantuan, Pengeluaran Panti Asuhan, dan Neraca Akhir. Laporan keuangan yang sudah jadi kemudian ditandatangani oleh ketua dan bendahara lalu di kirim ke Yayasan Dharmais melalui kantor pos.

4) Laporan Keuangan untuk Pemerintah

Laporan keuangan untuk pemerintah adalah laporan keuangan untuk dinas sosial dan kementerian sosial. Laporan keuangan untuk dinas sosial di buat setiap 3 bulan sekali. Laporan keuangan untuk pemerintah biasa dibuat oleh Istri dari Bapak Jarsono selaku sekretaris. Ini dikarenakan Ibu Ngatilah belum bisa membuat laporan keuangan yang sesuai pemerintah. Untuk laporan keuangan yang diberikan ke kementerian sosial bersifat indisental. Laporan keuangan dibuat ketika ada bantuan dari kementerian sosial saja.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, panti asuhan merupakan organisasi nirlaba, sehingga Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Maka dari itu, akuntabilitas keuangan Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono belum memadai. Laporan keuangan yang dibuat belum sesuai standar PSAK No.45.

C. Kendala dan Solusi

Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono sudah beroperasi selama 13 tahun. Selama itu pula kendala ditemui dalam perjalanan aktivitas organisasi. Peneliti kemudian meminta solusi atas kendala panti asuhan kepada Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., Ak selaku praktisi akuntansi. Kendala tersebut antara lain :

1. Defisit Anggaran

Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono tidak membuat rancangan anggaran untuk masa 1 tahun. Dalam operasi organisasi berjalan dengan dana yang ada. Sehingga panti asuhan sering mengalami defisit keuangan. Kekurangan dana kemudian digenapi oleh pengurus panti asuhan terlebih dahulu.

Tidak merancang anggaran dana adalah suatu hal yang fatal. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tujuan organisasi. Bila anggaran tidak ada, tujuan organisasi sulit dicapai. Anggaran merupakan penerjemahan dari rencana kegiatan atau program organisasi dan sumber dana yang dibutuhkan. Untuk itu, anggaran berperan seperti peta bagi pelaksanaan kegiatan. Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono harus membuat anggaran untuk tercapainya tujuan organisasi serta mengurangi kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Solusi kekurangan dana, peneliti bertanya pada pakar akuntansi dan praktisi dibidang organisasi sektor publik non-pemerintah yaitu Bapak Akhyar Adnan dalam wawancara beliau mengatakan :

“Kekurangan dana bisa datang ke orang, biasakan publikasi le lazimu, koran. Banyak orang kelebihan dana tapi orang gak tahu mau dibawa kemana”

Dari pernyataan diatas, dapat peneliti jabarkan bahwa Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono harus mengeluarkan laporan keuangan dan diterbitkan ke koran lokal maupun nasional. Dengan adanya penerbitan laporan keuangan, maka orang-orang yang memiliki penghasilan lebih, bisa mengalihkan uangnya untuk disumbangkan. Penerbitan laporan keuangan ke publik memungkinkan banyak orang melihat kekurangan dana di panti asuhan. Terlebih panti asuhan sudah memiliki rekening bank yang memudahkan donatur yang jauh untuk menyumbang. *Insyallah* kekurangan dana panti asuhan dapat terpenuhi.

2. Kurang Aktifnya Pengurus Panti Asuhan

Pengurus panti asuhan berjumlah 45 orang yang tertera di papan struktur organisasi. Dari keseluruhan anggota, hanya beberapa yang aktif mengurus organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Jarsono selaku sekretaris dan pengurus harian panti asuhan :

“Untuk pengurus tidak semuanya aktif. Mengkin karena ada kesibukan masing-masing. Kalau rapat yang datang hanya itu-itu saja”

Hal ini menyebabkan setiap pergantian kepemimpinan yang terpilih juga sama seperti tahun sebelumnya. Ibu Ngatilah selaku bendahara juga mengeluh karena dari awal panti asuhan berdiri beliau yang memegang bagian keuangan. Padahal kapabilitas Ibu Ngatilah belum memadai. Jika ini berlanjut terjadi maka akan mengganggu stabilitas organisasi.

Bapak Akhyar Adnan memberikan solusi dalam wawancara:

“Harus ada upaya pengkaderan kepada panti asuhan. Ada kelebihan potensi anak yang bisa dilatih. Anak SMA bisa disuruh untuk belajar. Ini untukantisipasi dan persiapan bila ada hal-hal yang menyebabkan harus ada pengganti bendahara.”

Dari pernyataan diatas, peneliti dapat menjabarkan bahwa pengkaderan adalah penting. Pengkaderan adalah proses untuk membina seseorang oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi yang

membantu tugas dan fungsi pokok organisasi. Dengan adanya upaya pengkaderan, potensi yang dimiliki oleh anak panti asuhan dapat maksimal di kembangkan.

Panti asuhan bisa menyelenggarakan workshop untuk menunjang kinerja pengurus panti asuhan. Bila dana menjadi masalah, maka bisa mengajukan proposal ke instansi pemerintah. Bapak Akhyar Adnan memberi tanggapan dalam wawancara terkait *workshop*:

“Saya pernah membuat pelatihan untuk pengurus panti asuhan dalam masalah pembukuan keuangan. Namun respon mereka kurang. Padahal pelatihan gratis, diberi snack dan makan siang. Pengurus datang saat acara sudah dimulai, bahkan pulang saat acara berlangsung.”

Panti asuhan sebagai sebuah organisasi sektor publik memerlukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban baik apabila kinerja juga baik. Maka kapabilitas pengurus juga harus berbanding lurus untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Laporan Keuangan belum sesuai PSAK

Panti asuhan merupakan organisasi nirlaba sesuai dengan kriteria Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. Maka laporan keuangan Organisasi Nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono laporan keuangan yang disusun adalah laporan keuangan kebutuhan harian, laporan keuangan donatur tetap, laporan keuangan untuk lembaga swasta, dan laporan keuangan untuk pemerintah. Menanggapi hal ini, Bapak Akhyar Adnan memberi pernyataan:

“Laporan keuangan tidak mutlak harus sesuai PSAK. Jangankan lembaga kecil seperti panti asuhan. Lembaga besar saja tidak. Standar tidak harus PSAK 45. Bikinlah yang simpel namun terklasifikasi dan bisa diaudit”.

Dari pernyataan diatas, peneliti menjabarkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba seperti panti asuhan tidak harus mutlak sesuai PSAK No.45. PSAK No.45 nampaknya belum menjadi sebuah keharusan bagi organisasi nirlaba untuk menjadikan standar yang memaksa. Tidak adanya sanksi bagi organisasi yang melanggar standar tersebut.

Meskipun begitu panti asuhan harus tetap membuat laporan keuangan yang mudah dipahami oleh *stakeholders*. Laporan keuangan yang mudah dibaca dapat menarik simpati orang untuk menyumbangkan dananya. Laporan keuangan yang terklasifikasi dapat mudah diaudit untuk menghindari kecurangan.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas akuntabilitas pengelolaan Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono adalah

1. Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono telah melakukan hal-hal yang mencerminkan akuntabilitas menurut Islam. Akuntabilitas vertikal sudah dilaksanakan, hal ini tercermin dalam : *Pertama*, kesadaran pengurus bahwa tugas mereka adalah amanah dari Allah SWT. *Kedua*, sumber dana halal dan di salurkan keseluruhan untuk kebutuhan panti asuhan. *Ketiga*, selama panti asuhan berdiri tidak ada kecurangan yang terjadi. *Keempat*, program panti asuhan berlandaskan Islam.
2. Akuntabilitas horizontal belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan prosedur pelayanan untuk donatur belum ada, dokumentasi perencanaan program dan monitoring belum sistematis, ada pengulangan jabatan setiap periode, dan laporan keuangan belum sesuai PSAK No.45. Sehingga tingkat akuntabilitas Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono masih rendah.
3. Kendala yang dialami Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono adalah defisit anggaran, kurang aktifnya pengurus panti asuhan dan laporan keuangan belum sesuai PSAK No. 45. Solusi atas kendala yang ada adalah Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono harus mempublikasikan laporan keuangan ke koran, melakukan pengkaderan untuk pengurus sebagai upaya maksimalisasi potensi dan tindakan preventif, mengadakan workshop pelatihan pembukuan keuangan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut

1. Kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono
Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan panti asuhan dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, membuat anggaran masa periode tertentu dan didokumentasikan, mengingat anggaran adalah suatu hal yang penting dalam organisasi, menyelenggarakan kaderisasi dengan pelatihan seperti solusi yang diberikan Bapak Akhyar selaku praktisi akuntansi untuk pengurus panti asuhan dan santri agar tidak terjadi pengulangan jabatan dan dapat meningkatkan kapabilitas pengurus panti asuhan, melakukan pembukuan secara baik dan benar sesuai standar yang berlaku, yaitu PSAK No.45.
2. Kepada Pemerintah
Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan untuk pengurus panti asuhan guna meningkatkan kapabilitas kinerja. Pemerintah dapat

menegaskan ulang kewajiban penggunaan standar PSAK No.45 kepada organisasi nirlaba serta memantau pelaksanaannya.

3. Kepada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian, seperti menjadikan seluruh panti asuhan di provinsi DIY objek penelitian. Dapat memperluas informan, sehingga tidak hanya internal namun juga eksternal seperti donatur, Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya. 2012. Al Fatih Center. Tangerang.
- Amerieska, Siti.2015.*Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory*. Syariah Paper Accounting FEB UMS.
- Anggraeni, M.D.2011.*Agency Theory dalam Perspektif Islam*. JHI Vol.9 No.2
- Anonim.2017.Sudah 86 M Dana Hibah Dicairkan.
<http://bulungan.prokal.co/read/news/10940-sudah-rp-86-m-dana-hibah-dicairkan.html>. Diakses pada 30 Desember 2017 pk 06.10 WIB.
- Atin.2017.Panti Asuhan Muhammadiyah Tuksono. <http://pantimuhtuksono.org/>. Diakses pada 2 Februari 2018 pk 07.02 WIB.
- Basri, H.2008.*Accountability in Islamic Religious organizations: A Case Study of Pesantren in the Province of Nanggro Aceh Darussalam-Indonesia*. Proposal for PhD Thesis,University Sains Malaysia
- Bastian, Indra.2007.Akuntabilitas untuk LSM dan Politik. Jakarta.Erlangga.
- _____.2007.Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Jakarta.Erlangga.
- Barzan, B.1999.Panti Asuhan sebagai Lingkungan Keluarga.Yogyakarta:Rineka Cipta.
- Davis,J.H., Schoorman, F.D., dan Donaldson, L.1997.*Toward A Stewardship Theory Of Management*. Academy of Management Review. Hal 20-47.
- Departemen Sosial RI.2004.Acuan Umum Pelayanan Sosial. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Endahwati, Yosi Dian.2014.*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH) Vol. 4 No 1
- Gultom,dkk.2015.*Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode GMIM*.Jurnal EMBA Vol.03 No.4 hal 527-537.

- Halim, dkk.2012.Akuntansi Sektor Publik.Salemba Empat.Jakarta
- Huda, Nurul.2013.Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research.Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.4 No.3.
- Jensen, M.C dan Meckling.1976.Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure.Journal of Financial Economics 3 hal. 305-360.
- Juliawanti,Linda.2017.Jelang Pemilu dan Pilkada, KPK Minta Pejabat Laporkan Harta Kekayaan.<https://news.idntimes.com/indonesia/linda/jelang-pemilu-dan-pilkada-kpk-minta-pejabat-laporkan-harta-kekayaan>.Diakses tanggal 29 Desember 2017 pk 21.03 WIB.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Kep/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas.
- Kholmi, Masiyah.2010.Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik.Jurnal Ekonomi Bisnis.
- Kiswanto,dan Mukhibad.2011.Analisis Budaya Islam dan Akuntabilitas. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.3 No.2 hal. 77-89.
- Mardiasmo.2002.Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta.Andi Yogyakarta
- _____.2004.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta.Andi Yogyakarta.
- Movanita,A.N.K.2017.Cara KPK Benahi Sistem Partai Politik Selama Tahun 2017.<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/05550211/cara-kpk-benahi-sistem-partai-politik-selama-tahun-2017>.Diakses pada 29 Desember 2017 pk 21.10 WIB.
- Pasha, Musthafa Kamal dan Barban.2013.Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.Yogyakarta.Pusat SM Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
- PP ‘Aisyiyah.Profil Muballighahat.2002.Yogyakarta.C-Hasan Grafika.
- PP Muhammadiyah.2015.Profil Amal Usaha Muhammadiyah.Yogyakarta.Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Prasetyo,J.E.2017.Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas.Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol.1 No.1 hal. 19-33.
- Raharjo,Eko.2007.Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi.Fokus Ekonomi Vol 02. No. 1 hal 37-46.

- Rizki, Diyani Ade.2013.*Analisis Penerapan PSAK No.45 pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya*.Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 12 No.7.
- Sarker, A.A.1999.*Islamic Business Contract, Agency Problem and The Theory of Islamic Firm*. International Journal of Islamic Financial Service. Vol. 01 No. 02.
- Siskawati,dkk.2016.*Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? Pemaknaan Akuntabilitas Masjid*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.7 No.1 hal. 1-155.
- Sudaryanti,D.2011.*Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi Di Indonesia*.Jurnal Terapan Ilmu Akuntansi Vol. 10 No. 1.
- Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Bisnis*.Alfabeta.Bandung hal 215-226.
- Tinungki,dkk.2014.*Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana*.Jurnal EMBA Vol.02 No.2 hal 809-819.
- PSAK Nomor 45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN.
- Wicaksono,dkk.2015.*Akuntabilitas Sektor Publik*.Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) Vol 19 No.01.
- Yuliarti, Novita Citra.2014.*Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember*.Jurnal Akuntansi Vol 12 No.02.
- Zaini,Syahminan.2005.*Isi Pokok Ajaran Islam*.Jakarta.Kalam Mulia.